**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI OLEH
PENGADILAN NEGERI MEDAN TERHADAP HARTA BERSAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.601
PK/Pdt/2007)**

PUDJI INDAH LESTARI

ABSTRACT

In the implementation of auction, there is auctioning organizational structure which in the central government it is known as Auction Administration Inspection, and the regional level the implementation and/or the Ruling on Auction Postponement from the Court should be informed in 3 (three) days prior to auctioning implementation. From the Articles found in the Civil Code and the Compilation of the Islamic laws, it is found that those who want to make an agreement, especially loan agreement, either in Sharia Banks or in Conventional Banks, have to fulfill the basic requirements stipulated in the Civil Code. The research problems were as follows: first, how about the legal force on foreclosure sale executed by the State Loan Service Office against non-performing loan; secondly, how about the legal provisions on joint property which is auctioned; thirdly, how about the postponement of foreclosure sale by the Medan District Court in its Ruling No. 601PK/Pdt./2007. The conclusion of the research is that legal force on foreclosure sale by the State Loan Service Office against non-performing loan in the execution or the implementation of the rulings is done by coercion on the loser in litigation. Article 35 of Law No. 1/1974 regulates joint property. In general, joint property is the property which is obtained during the marriage period in which both husband and wife attempt to fulfill their needs in their wedlock. The use of joint property needs formal or firm agreement.

Keywords: *Postponement of Foreclosure Sale, Medan District Court, Joint Property*

I. Pendahuluan

Lelang sudah dikenal sejak zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dahulu dimana tahun 1908 terbentuknya *Vendu Reglement* (Stbl. 1908.189), dan *Vendu Instruksi* (Stbl. 1908.190) pada saat itu lelang mulai dikenal di Indonesia dimana dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (*Vendumesteer*) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Keuangan. Tahun 1955, unit lelang Negara berada dilingkungan Departemen Keuangan.¹ Dalam perkembangannya lebih lanjut yaitu pada tahun 1955, unit/kantor Lelang Negara dialihkan dan berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan dengan demikian bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pengertian Lelang secara umum adalah penjualan barang yang melalui sebuah mekanisme terbuka untuk umum dengan melakukan sebuah penawaran harga baik secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat untuk mencapai sebuah harga maksimum yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang yang bahasa latin *Auctio* dan dalam bahasa inggris *Auction* dalam

¹ Mantayborbir.S, *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, (Medan, :Pustaka Bangsa Press, 2002), Hal 175

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti : Penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian dokumen yang dipersamakan adalah berdasarkan dokumen tersebut dapat dilaksanakan Lelang Esekusi tanpa melalui Putusan Pengadilan, misalnya;

1. Dokumen Hak Tanggungan terhadap kredit yang diberikan oleh bank.
2. Hipotek terhadap Bank-Bank Pemerintah yang di Lelang oleh KP3N.
3. Grosse Akta (Akta Notaris yang memakai Era-era Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa) .

Berdasarkan dokumen yang dipersamakan tersebut diatas dapat di laksanakan Lelang Eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan cukup dengan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian Lelang menurut kamus besar Bahasa Inggris adalah *Auction* : “*Public sale at white goods are sold to the person making the highest bids or offers*” yang berbahasa Indonesia berarti penjualan dihadapan umum dimana barang-barang dijual kepada penawaran tertinggi. Pengertian lelang dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (*Engelbrecht*) adalah :

“Open bare verkooping” verstaan veilingen en verkooping van zaken, walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de veiling of verkooping in kennis gesteloe, dan wel tot die veiligen of verkooping toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in te scrijven. Vendu Reglement Stbl 1908.189”.

Artinya dalam bahasa Indonesia adalah : Lelang atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau ijin untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Sedangkan menurut Polderman memberikan pengertian lelang sebagai alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.²

² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hal.106

Dalam pelaksanaan lelang ada yang dikenal dengan struktur organisasi lelang, yang ditingkat pusat dikenal dengan sebutan inspeksi Urusan Lelang dan ditingkat daerah yaitu:³

1. Kantor Lelang Negara dan Pegawainya merupakan pegawai organic Departemen Keuangan.
2. Pejabat Lelang (*Vendumesteer*) Kelas II yang pada mulanya dijabat rangkap oleh Notaris /PPAT, dan Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II (Bupati, Walikota dan Para Pejabat Struktural lainnya).

Perkembangan lebih lanjut organisasi unit/kantor lelang Negara digabungkan dan berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak dengan struktur organisasi ditingkat pusat adalah Dinas Inspeksi Lelang setingkat Eselon III dan tingkat daerah Kantor Lelang Negeri Kelas I (Setingkat Eselon IV). Diseluruh Indonesia terdapat 12 (dua belas) Kantor Lelang Negara Kelas I dan 1 (satu) orang Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di daerah Tingkat II.⁴

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 84 Tahun 2001 BURLN direorganisasi menjadi DJPLN yang kemudian diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri keuangan nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan adanya reorganisasi tersebut maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) sebanyak 36 dan Kantor Lelang Negara sebanyak 27 seluruh Indonesia digabungkan menjadi 1 unit atau kantor yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).⁵

Kantor Pelayanan menunda pelaksanaan lelang antara lain dalam hal adanya:⁶

1. Penerapan dan/atau Putusan Penundaan Lelang dari Badan Peradilan yang diberitahukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang;
2. Syarat- syarat lelang tidak dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan lelang, misalnya SKT/SKPT Lelang belum terbit;
3. Barang jaminan hutang disita pidana oleh Kejaksaan dan Kepolisian;
4. Pembayaran angsuran hutang yang besarnya paling rendah 30% (tiga puluh per seratusan) dari jumlah hutang dengan ketentuan:hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan PH/PjH harus membuat pernyataan secara tertulis diatas materai secukupnya untuk segera melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan apabila cidera janji, maka barang jaminan hutang tersebut dapat dilakukan pelelangan kembali.

³ Djamhuri Zein, 1996, *Pengurusan Lelang Negara*, Departemen Keuangan RI, Pusdiklat Keuangan Umum, hal 1

⁴ S.Mantayborbir, V.J Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta Pusat, hal 89

⁵ *Ibid.*, hal. 90

⁶ *Op-cit* hal 105

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang.”⁷ Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditor dan debitor). Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan hal yang penting, dimana setiap keluarga memerlukan harta kekayaan dalam menunjang kehidupan berkeluarganya. Harta kekayaan tersebut terdiri dari:⁸

1. Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Jadi di sini semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut di atas dinamakan salah seorang, suami atau isteri. Bahkan juga harta yang dibeli dengan uang yang diperoleh selama perkawinan juga termasuk harta bersama. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Dalam hal ini suami isteri dalam melaksanakan pengelolaan dan menentukan harta bersama ini, harus saling terbuka dan saling memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri.

2. Harta bawaan

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Mengenai apa yang disebut harta masing-masing atau harta sang suami atau harta sang isteri, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas telah menyebutkan terdiri dari :

1. harta bawaan sang suami dan harta bawaan sang isteri sebelum perkawinan berlangsung, dibawa ke dalam perkawinan;

harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan atas nama sang suami atau atas nama sang isteri, baik sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung.

Didalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.601PK/Pdt/2007 tanggal 02 April 2008 yang pada keputusan menyatakan,

⁷ Mariam Darul Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 28

⁸ Pasal 35-35 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Mahkamah Agung R.I telah memutuskan dan mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (BPDSU MEDAN). menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya objek yang diperjanjikan yang halal yang merupakan milik dari pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini maka debitur memberikan objek jaminan yang bukan merupakan miliknya telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu maka perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan pihak bank adalah tidak sah karena objek yang diperjanjikan adalah objek hak atas tanah yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Disamping itu seluruh perjanjian yang dibuat atas tanah yang dijadikan jaminan kredit dengan cara melawan hukum. Seluruhnya mengandung cacat hukum. Dan oleh karena itu batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ke III yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara perdata no.233/Pdt.G/1998/PN-Mdn Junto peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 601PK/Pdt/2007 pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

Nama Supiah, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.

Cengkeh Turi No.331 Binjai.

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat.

Melawan

1. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan, dalam hal ini diwakili oleh pimpinannya, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 7 Medan.

. Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I.

2. Menteri Keuanga RI di Jakarta, cg. Departemen Keuangan RI Kantor Wilayah I KP3N Medan, beralamat di Jl. Diponegoro No. 3-A Medan.

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II.

3. ABD. LATIEF, wiraswasta, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Cengkeh Turi No.331 Binjai.

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat III.

Dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI maka posisi kasus kembali pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.233/Pdt.G/1988/PN-Mdn menyatakan sebagai berikut:

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.601 PK/Pdt/2007. hal 11

1. Bahwa penggugat (Supiah) sangat keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh tergugat II (Kantor Wilayah I KP3N Medan) sesuai dengan surat perintah penyitaan No. SPS.8/PUPN.W.I/1998 tanggal 13 Januari 1998 atas tanah milik penggugat (harta bersama) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sendang Rejo seluas +3.725 m² sesuai dengan SK. GUBSU No.592.1.12/L/II/1984;
2. Bahwa penggugat adalah suami isteri dengan tergugat III, yang telah menikah di Binjai pada tahun 1964 sesuai dengan surat nikah tertanggal 25 Agustus 1964;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak yaitu:
 1. JOKO PRAWIRA, lahir tahun 1966;
 2. TRI PUJI RAHMAYANTI, lahir tahun 1970;
 3. M.IKHSAN, lahir tahun 1973;
 4. DEWI KARTIKA WAHYUNI, lahir tahun 1974;

Hal ini sesuai dengan surat Kartu Keluarga no.093/1.61/047/L/1988 tertanggal 10 November 1988;

1. Bahwa selama berumah tangga dengan tergugat III (Abd.Latif), ada mempunyai tanah (harta bersama) yang terletak di Sendang Rejo/Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Langkat sesuai dengan SK.GUBSU yang telah disebutkan diatas;
2. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat tanah tersebut telah digadaikan oleh suami penggugat (tergugat III) kepada tergugat I untuk dijadikan jaminan dengan jumlah kredit Rp.150.000.000,- sesuai dengan surat pernyataan tanggal 23 Juli 1997;
3. Bahwa akta notaris no.32 tentang pengakuan hutang dan pemberian jaminan tanggal 7 November 1989, tergugat III tidak didampingi oleh penggugat dan tidak ada surat persetujuan penggugat, berdasarkan hal-hal-hal yang penggugat uraikan diatas penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan seluruh petitum surat perlawanan penggugat;

Bahwa sebelum kredit macet diserahkan oleh tergugat I kepada tergugat II, tergugat I telah mengadakan hubungan hukum dengan tergugat III. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat III adalah suami istri. Karena tertarik untuk diteliti terhadap akta notaris No. 32 tanggal 07 November 1989, tentang pemberian jaminan tergugat III sebagai suami penggugat yang tanpa persetujuan penggugat sebagai isterinya.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam hal ini suami (Tergugat III) seharusnya mendapat persetujuan isteri (Penggugat) untuk membuat jaminan

dihadapan notaris harus mendapat persetujuan dari penggugat. Penggugat merasa keberatan karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dilelang oleh KP3N Medan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum sita eksekusi yang diletakkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, terhadap kredit yang macet?
2. Bagaimana pengaturan hukum atas harta bersama yang dilelang?
3. Bagaimana Penundaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No.601PK/Pdt./2007?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum sita eksekusi yang diletakkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, terhadap kredit yang macet.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas harta bersama yang dilelang.
3. Untuk mengetahui Penundaan Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No.601PK/Pdt/2007.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.
 4. Putusan Mahkamah Agung RI.No.601PK/Pdt/2007.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku ilmu hukum, tesis, disertasi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti hasil seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk lebih mengembangkan data peneliti ini,

dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian hukum atas harta bersama yang dilelang sebagai jaminan kredit, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Demikian Pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Harta bersama ini boleh diartikan bahwa pokok utama mengenai harta bersama adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta pencaharian bersama yang lazim disebut harta syarikat.

Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri hidup berusaha memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga. Memang pada pokoknya berdasarkan hukum adat harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta syarikat diantara suami isteri, sekalipun disana sini terdapat variasi, misalnya dalam masyarakat patrilineal, harta yang berasal dari kerabat isteri dalam kawin ambil anak tidak dibenarkan hukum dijadikan sebagai kekayaan bersama.¹⁰

Terbukanya hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat bagi pengaturannya harta bersama ini adalah untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di negara kita.¹¹ Hal ini untuk mempermudah soal siapa yang harus mengurus barang-barang itu dan siapa yang berkuasa menjual barang-barang itu. Dalam hal ini kekuasaan barang-barang itu tetap berada pada pihak siapa yang mempunyai barang-barang itu. Hal ini dipermudah pula oleh ketentuan Hukum Islam, bahwa seorang perempuan yang bersuami, leluasa untuk melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan atau kuasa dari suaminya, juga mengenai barang-barang kekayaannya.¹²

Mahkamah Agung menguatkan putusan ini dengan keputusan nomor 1031/K/Sip/1973, tanggal 23 Mei 1973. Juga keputusan Pengadilan Tinggi nomor 16/1972, tanggal 11 Maret 1972, bahwa meskipun rumah sengketa terdaftar atas nama isteri, tetapi karena terbukti bahwa rumah itu diperoleh dan dibangun selama perkawinan, maka dianggap sebagai harta bersama, dan dapat dijadikan untuk membayar hutang suami isteri, sekalipun suami isteri berasal dari Tapanuli Selatan.¹³

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan, sekalipun pada prinsipnya Hukum Islam tidak mengenal harta syarikat, harta syarikat tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam hal ini

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 177

¹¹ Abdurrahman & Ridwan Syarhani, "*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandung:Alumni, 2003), hal 29

¹² R.Wirjono Prodjodokoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Cetakan kedua (Bandung: Sumur, 1990), hal 107

¹³ Ismuha H, "*Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*", (Jakarta:Bulan Bintang), hal 50-51

Harjono, juga mengatakan, bahwa hukum adat yang tidak prinsipil bertentangan dengan Hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Selanjutnya J.Prins, juga mengatakan sekalipun secara teori hukum Fiqih Islam tidak ada mengatur hukum harta syarikat antara suami dan isteri selama perkawinan, tetapi hal itu tidak menghalangi terciptanya lembaga hukum itu dalam keluarga islam apabila kenyataan dalam kehidupan mereka, istri selamanya ikut suami dalam pekerjaan dengan sendirinya secara diam-diam terwujudlah diantara mereka harta bersama.¹⁴

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Tergugat III melangsungkan perkawinan tanggal 20 agustus 1964 hal ini sesuai dengan surat akte nikah No 629/1964, yang telah dibuktikan dalam persidangan.Selanjutnya penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa surat tanah milik bersama tersebut dijadikan anggunan oleh tergugat III tanpa sepengetahuan atau seizin penggugat hal ini telah dibuktikan oleh penggugat dengan surat bukti P4 guna menjadi jaminan kredit yang diterima oleh tergugat I.

Yakni sesuai dengan pasal 36 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi : “Mengenai harta bersama suami/isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Oleh karena harta bersama penggugat dan tergugat III dijadikan sebagai jaminan kredit tanpa izin sepengetahuan si penggugat, maka menurut hukum gugatan penggugat menerima surat tanah harta bersama antara penggugat dengan tergugat III tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum dengan demikian petitum No 3 dari penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang baik.¹⁵Majelis hakim menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum lagi akte notaries No.32 tanggal 7 november 1989 oleh karena didalam akte tersebut yang menjadi jaminan tidak hanya dengan harta bersama antara penggugat dengan tergugat III maka majelis hakim menyatakan bahwa akte no 32 tanggal 7 november 1989 tersebut tidak berlaku/tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap jaminan yang diberikan oleh tergugat III dalam hal ini tanah yang tersebut dalam SK. GUBSU. No 592.1.12/L/II/1984 tanggal 3 februari 1984

Yakni tentang sita jaminan tanggal 13 januari 1998 No.SPS/8/PUPNW I /1998 dan berita acaranya majelis hakim mengambil alih dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak berkekuatan hukum mengenai penyitaan terhadap harta bersama antara tergugat dengan tergugat III yaitu terhadap SK GUBSU No 592-1-12/L/II/1984 tanggal 3 februari 1984. Penggugat beralasan hukum untuk dikembalikan dengan pertimbangan bahwa penyerahan sebagai jaminan kredit yang diterima oleh tergugat I tidak seizin dan sepengetahuan si penggugat.Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan agar tergugat membayar uang paksa (Dwang soom)

¹⁴ M.Yahya Harahap, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, (Medan:Zahir Trading, 2001), hal 118

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 233/Pdt.G.1998 PN.Mdn tanggal 16 Maret 1969 hal 24

secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- mulai dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti tetapi majelis hakim berpendapat oleh karena hubungan dwang soom dengan perkara ini dapat diterapkan maka beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi mengenai jumlah yang diminta oleh penggugat menurut hemat majelis hakim terlalu tinggi maka majelis hakim menetapkan bahwa jumlah yang adil untuk itu adalah sebesar Rp.10.000,-/hari.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung RI No.601 PK/Pdt/2007 tanggal 2 april 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No.233/Pdt.G/1998/PN Mdn tanggal 16 maret 1999 adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum akte notaris no 32 tanggal 7 november 1989 tentang pengakuan hutang dan pemberian jaminan sepanjang mengenai tanah yang terletak jl perintis kemerdekaan desa sendang rejo kecamatan binjai kodya binjai (SK GUBSU No.592.1-12/L/II/1984) tanggal 3 february 1984 atas nama ABDUL LATIF.
2. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum lagi sita jaminan tanggal 13 januari 1998 No SPS.8/PUPNW.I/1998 terhadap tanah yang terletak jl perintis kemerdekaan desa sendang rejo kecamatan binjai kodya binjai (SK GUBSU No.592.1-12/L/II/1984) tanggal 3 february 1984 atas nama ABDUL LATIF. Untuk itu harus diangkat.
3. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan surat tanah milik penggugat yakni SK GUBSU No.592.1-12/L/II/1984) tanggal 3 february 1984 dalam keadaan baik dan sempurna.
4. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat perbuatan melanggar hukum.
5. Menghukum tergugat-tergugat membayar uang paksa terhadap dwang soom secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000,-/hari dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tergugat I dan II telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI serta mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dan seluruhnya upaya hukum tersebut ditolak, maka dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 233/Pdt.G 1998 PN Mdn tanggal 16 maret 1999 telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian kewajiban dari tergugat untuk memenuhi isi keputusan Pengadilan Negeri tersebut.

¹⁶ *Ibid* hal 28

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Yuridis Penundaan Lelang Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Medan Terhadap Harta Bersama (Studi Kasus Putusan No.233/Pdt.G/1998/Pn-Mdn), sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum sita eksekusi yang diletakkan oleh kantor pelayanan pengurusan piutang negara terhadap kredit yang macet dalam eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Maksudnya adalah menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa dan atau dengan bantuan kekuatan umum sekalipun, apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara tidak memenuhi putusan secara sukarela. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUHPerdara, dengan demikian apabila misalnya seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, maka akan dilakukan sita eksekusi yang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku menurut KUHPerdara. Pelaksanaan pengurusan piutang negara pada KP3N sesuai dengan Undang-undang nomor 49 Prp tahun 1960 sebagai petunjuk pelaksanaan sita eksekusi pada KP3N serta surat Keputusan kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagai petunjuk teknis.
2. Pengaturan hukum atas harta bersama yang dilelang maksudnya ialah membuka kemungkinan berlakunya hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan harta bersama, umpamanya Hukum Perdata Barat (BW) untuk mengatur harta bersama bagi orang-orang Tionghoa, orang-orang Eropa dan yang dipermasalahkan dengan mereka yang berada di Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35 ini didalamnya sudah ada diatur mengenai harta bersama. Dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri hidup berusaha memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga. Penggunaan atau pemakaian harta bersama ini diperlukan adanya persetujuan secara formal atau secara tegas.
3. Penundaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No.601PK/Pdt./2007. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Medan, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak. Karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali. Menurut undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-

undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mahkamah Agung RI telah memutuskan dan mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Medan. menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung RI No.601 PK/Pdt/2007 tanggal 2 april 2008 ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan No.233/Pdt.G/1998/PN Mdn tanggal 16 Maret 1999 telah berkekuatan hukum tetap.

4. Saran

1. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengurusan piutang negara pada satu pihak agar berlaku secara efisien dan efektif dan pada pihak lain para nasabah debitur/penanggung hutang mendapat jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa dan atau dengan bantuan kekuatan umum sekalipun, apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara tidak memenuhi putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, artinya mempunyai daya laku (kekuatan) mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah penggugat atau tergugat.
2. Pemerintah Indonesia dalam pengaturan hukum atas harta bersama yang dilelang yang sudah diatur dalam Undang-undang harus dipertegas dan/atau dijelaskan secara rinci bagian-bagian mana harta bersama itu yang harus dilelang. Perlunya jaminan dalam pemberian kredit dalam harta bersama yang dilelang untuk mencegah resiko yang akan timbul apabila pembayaran pelunasan kredit tidak lancar atau dengan kata lain apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pejabat Notaris harus memperhatikan peraturan atau Undang Undang No.1 Thn 1974 khususnya terhadap harta bersama.
3. Penundaan lelang eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia harus dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan juga harus dalam keadaan yang baik. Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan harus diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Abdurrahman, Syarhani, Ridwan. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003.

Badruzaman, Darul. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1991.

Harahap, M, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : Zahir Trading, 2001.

Harahap, M, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : PT. Gramedia, 1991.

Ismuha, H. *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.

Mantayborbir, S. *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2002.

Mantayborbir, S, Mantayborbir, V.J. *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*. Pustaka Bangsa Press. Jakarta Pusat.

Prodjodokoro, R, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1990.

Soemitro, Rochmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung : PT. Eresco, 1987.

Zein, Djamhuri. *Pengurusan Lelang Negara*. Departemen Keuangan RI. Pusdiklat Keuangan Umum, 1996.